

PELATIHAN HARD SKILL DAN SOFT SKILL DALAM REVOLUSI INDUSTRI MENGATASI PENGANGGURAN TERDIDIK

Indah Yuliasari

Universitas Indraprasta PGRI Jakarta
yuliasari.wibowo@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan revolusi Industri di Indonesia sangat pesat berdasarkan studi pemetaan industri yang dilaksanakan Departemen Perdagangandiperoleh informasi bahwa kontribusi revolusi industri terhadap perekonomian Indonesia dapat dilihat pada lima indikator utama, yaitu Produk Domestik Bruto, ketenagakerjaan, jumlah perusahaan dan ekspor. Revolusi industri berhasil mendorong terjadinya industrialisasi di berbagai sektor, keterkaitan revolusi industri, industrialisasi, produksi masal dan income generating menyebabkan terjadinya dampak positif yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Bahkan industri makanan dan minuman menjadi sektor unggulan banyak menyerap hasil pertanian, industri tekstil dan produk tekstil menjadi unggulan karena banyak menyerap tenaga kerja. Industri transportasi menjadi unggulan karena mampu mempermudah dan mempersingkat waktu perjalanan. Pembangunan sektor industri di kota Banjarmasin melaju pesat hal ini terlihat dengan banyak didirikannya perusahaan industri. Jumlah industri sebanyak 352 ribu industri dan menyerap lebih dari 1,5 juta orang sebagai tenaga kerja 15% dari penduduk usia kerja. Aktivitas industri di kota Banjarmasin yang sudah berjalan mempunyai dampak positif. Masyarakat akan memperoleh tiga manfaat berupa penghematan skala, lokasi dan urbanisasi. Perkembangan industri memberikan kontribusi terhadap industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi di kota Banjarmasin, hanya saja belum ada penelitian yang mengukurnya dan membahas manfaat tingkat perkembangan industri, berusaha mengkaji perkembangan industri dan penyerapan tenaga kerja serta manfaatnya bagi kota Banjarmasin.

Kata kunci: revolusi industri, pengangguran terdidik

ABSTRACT

The development of industrial revolution in Indonesia is very rapid based on industry mapping study conducted by the Ministry of Commerce obtained information that the contribution of industrial revolution to the Indonesian economy can be seen in five main indicators, namely Gross Domestic Product, employment, number of companies and exports. The industrial revolution succeeded in encouraging industrialization in various sectors, the interrelationship of the industrial revolution, industrialization, mass production and income generating caused a positive impact called economic growth. Even the food and beverage industry into the leading sector absorbed many agricultural products, textile and textile products became excellent because it absorbed many workers. The transportation industry is a pre-eminent one because it is able to simplify and shorten travel time. The development of the industrial sector in the city of Banjarmasin is moving rapidly this is seen with many industrial companies established. The industry amounts to 352 thousand industries and absorbs more than 1.5 million people as 15% workforce of the working age population. Industrial activities in the city of Banjarmasin that have been running have a positive impact. The community will have three benefits in terms of scale savings, location and urbanization. Industrial development contributes to industrialization and economic growth in the city of Banjarmasin, it's just that there has been no research that measures and discusses the benefits of the level of industrial development, trying to assess industrial development and employment and benefits for the city of Banjarmasin.

Keywords: *industria lrevolution, educated unemployment.*

PENDAHULUAN

Fenomena pengangguran telah menjadi tantangan di negara Indonesia. Seringkali dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya

lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk. Sempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan karena faktor kelangkaan modal untuk berinvestasi. Pengangguran saat ini dipandang sebagai salah satu indikator kemiskinan karena per definisinya

penganggur adalah penduduk yang mencari kerja (looking for work). Dikaitkan dengan kemiskinan, karena argumentasinya belum bekerja, mereka merupakan kelompok penduduk strata ekonomi rendah yang membutuhkan pekerjaan. Argumentasi ini tidak seluruhnya benar, karena banyak dijumpai kelompok penduduk tidak bekerja karena lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan pendidikannya dan mereka memilih tidak bekerja dari pada asal kerja. Di negara-negara maju, seorang pengangguran memperoleh jaminan sosial dalam bentuk bantuan makan. Sebaliknya di negara berkembang, seseorang agar bisa hidup harus bekerja sekalipun bekerja asal kerja, sehingga jumlah pengangguran relatif kecil. Fenomena pengangguran di Indonesia patut diwaspadai bagi stabilitas ekonomi sosial adalah pengangguran terdidik (skill edun employment).

Kelompok ini jumlahnya tidak banyak tetapi berpotensi menimbulkan kerusuhan atau krisis jika lapangan kerja yang ada ternyata tak mampu menampung mereka. Mereka adalah kelompok terdidik, berpendidikan minimal SLTA dan memiliki akses ekonomi, sosial, maupun politik. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di daerah itu pada Agustus 2016 sebesar 3,88 persen atau sebanyak 86,6 ribu orang. Angka ini menunjukkan terjadi penurunan dibanding Agustus 2015 sebesar 4,62 persen. Daerah dengan TPT tertinggi adalah Kota Pontianak sebesar 7,26 persen dan Kota Singkawang 5,34 persen. Sementara TPT terendah di Kabupaten Kapuas Hulu 2,50 persen dan Kayong Utara 2,56 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kalbar menurut hasil survei angkatan kerja nasional (Sarkernas) Agustus 2016 sebesar 73,93 persen dengan angkatan kerja sebanyak 2,23 juta orang. Angka ini lebih besar atau naik 0,76 point dibandingkan Agustus 2015 sebesar 73,17 persen. Tertinggi terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu 77,48 persen dan Sekadau 77,26 persen. Sedangkan yang terendah di Kota Pontianak 63,87 persen dan Kota Singkawang 67,17 persen. Penganggur terdidik sebenarnya memiliki potensi besar secara ekonomi. Dari segi usia mereka pada umumnya usia produktif, memiliki motivasi

kuat untuk menghasilkan output. Mereka juga mempunyai pemahaman bahwa lebih baik menganggur dari pada asal bekerja, karena jika asal kerja mereka tidak akan berbeda dengan pekerja informal. Selama menganggur mereka masih mampu menghidupi dirinya. Sebagai kelompok penduduk yang terdidik, kesadaran politik sosial mereka cukup tinggi, dan cenderung kritis terhadap pemerintah selaku regulator tidak menjalankan peranannya dengan baik. Dengan demikian, permasalahannya menjadi komprehensif. Solusi secara parsial hanya menghasilkan stabilitas sesaat dan akan berbahaya dimasa mendatang. Salah satu solusi untuk mengatasi pengangguran terutama pengangguran terdidik adalah dengan mengembangkan revolusi industri di Banjarmasin. Potensi pengembangan revolusi industri, memiliki kombinasi yang baik antara talenta yang dimiliki oleh penduduknya dan banyaknya budaya lokal yang mengakar kuat dalam masyarakat. Menurut data Departemen Perdagangan, revolusi industri pada 2016 menyumbang Rp 104,4 triliun, atau rata-rata 4,75% terhadap PDB nasional selama 2013-2016. Jumlah ini melebihi sumbangan sektor listrik, gas dan air bersih. Tiga subsektor yang memberikan kontribusi paling besar nasional adalah fashion (30%), kerajinan (23%) dan periklanan (18%). Selain itu, sektor ini mampu menyerap 4,5 juta tenaga kerja dengan tingkat pertumbuhan sebesar 17,6% pada 2016. Ini jauh melebihi tingkat pertumbuhan tenaga kerja nasional yang hanya sebesar 0,54%. Namun, ia baru memberikan kontribusi ekspor sebesar 7%, padahal di negara-negara lain, seperti Korsel, Inggris dan Singapura, rata-rata di atas 30%. Khususnya tantangan revolusi industri diyakini akan menjadi primadona. Ada tiga alasan yang mendasari keyakinan tersebut, yaitu hemat energi karena lebih berbasis pada kreativitas, lebih sedikit menggunakan sumber daya alam, dan menjanjikan keuntungan lebih tinggi. Ketiga faktor di atas juga ditopang oleh ketersediaan sumber daya manusia. Saat ini jumlah penduduk Indonesia sekitar 230 juta jiwa. Populasi yang berusia 15-29 tahun berkisar 40,2 juta atau hampir 18,4% merupakan pasar yang potensial bagi produk-produk revolusi industri. Data potensi

perkembangan revolusi Industri di Indonesia terutama di Banjarmasin sangat besar, sehingga diharapkan revolusi Industri dapat menjadi solusi mengatasi pengangguran terutama pengangguran terdidik di kota Banjarmasin.

METODE

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengukur aglomerasi industri berdasar perbandingan jumlah tenaga kerja industri di Banjarmasin .
2. Mengkajitambahan referensi dan gambaran informasi yang dapat

HASIL

Definisi pengangguran dan pengangguran terdidik adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensimaksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama. Pengangguran terdidik adalah seseorang yang telah lulus dari perguruan tinggi negeri atau swasta dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Para penganggur terdidik biasanya dari kelompok masyarakat menengah ke atas, yang memungkinkan adanya jaminan kelangsungan hidup meski menganggur. Pengangguran terdidik sangat berkaitan dengan Masalah kependidikan di negara berkembang pada umumnya, antara lain berkisar pada masalah mutu pendidikan, kesiapan tenaga pendidik, fasilitas, dan Kurangnya lapangan pekerjaan yang akan berimbas pada kemapanan sosial dan eksistensi pendidikan dalam pandangan masyarakat. Pada masyarakat yang tengah berkembang, pendidikan diposisikan sebagai sarana untuk peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada. Dalam arti lain, tujuan akhir program pendidikan bagi masyarakat pengguna jasa pendidikan. Dari total jumlah penduduk hanya sebagian yang bekerja, dan sebagian lainnya tidak bekerja. Mereka yang bekerja adalah mereka yang berminat untuk bekerja, telah berusaha mencari atau menciptakan

berguna bahan studi komparatif bagi penelitian selanjutnya.

Untuk menguji aglomerasi industri alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier dengan metode Ordinary Least Squares (OLS). Analisis data ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variable independen terhadap variable dependen. Dengan menggunakan alat analisis tersebut akan diperoleh koefisien pengaruh dari masing-masing variable independen. Aglomerasi sector industry diukur dengan menggunakan Balassa Indeks (Indeks Balassa).

pekerjaan, dan berhasil mendapatkan atau mengembangkan pekerjaan. Sedangkan mereka yang tidak bekerja adalah mereka yang sedang berusaha mendapatkan atau mengembangkan pekerjaan tetapi belum berhasil, dan mereka yang berniat untuk tidak bekerja. Mereka yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan tetapi belum berhasil menemukannya disebut pengangguran. Istilah pengangguran (unemployment) tidak berkaitan dengan mereka yang berniat untuk tidak bekerja seperti siswa atau mahasiswa (sekalipun ada yang sambil bekerja atau berusaha mencari pekerjaan sambil sekolah atau kuliah, mereka diasumsikan tidak mencari pekerjaan), ibu rumah tangga yang sengaja memfokuskan diri untuk mengurus keluarga, atau penduduk usia kerja yang karena kondisi fisik mereka tidak dapat bekerja sehingga tidak mencari kerja (Djohanputro, 2006). Pengangguran merupakan salah satu persoalan dalam pembangunan. Pengangguran dapat dikelompokkan menurut sumber atau penyebabnya. Pengangguran menurut cara ini terdapat 4 jenis pengangguran yaitu:

1. Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi antara pencari kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh pekerjaan, tetapi karena sedang mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang

berkembang pesat, jumlah pengangguran rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sedangkan pengusaha sulit memperoleh pekerja. Untuk itu pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal inilah yang akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari kerja baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. Dalam proses mencari pekerjaan baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur.

2. **Pengangguran Silikal**

Pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan hal ini mendorong pengusaha menaikkan produksi untuk itu lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat mengalami penurunan. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang mempunyai hubungan juga akan mengalamikemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaaperusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, maka pengangguran akan bertambah.

3. **Pengangguran Struktual**

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang akibatkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju sebagian akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor yaitu munculnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri sangat menurun karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara

lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur.

4. **Pengangguran Teknologi**

Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya. Contohnya racun rumput telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah dan lahan pertanian lainnya. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubah, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Di pabrik ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia.

Pengangguran dapat juga dikelompokkan menurut ciri pengangguran yang berlaku. Menurut cara ini terdapat 4 jenis pengangguran yaitu:

1. **Pengangguran Terbuka**

adalah pengangguran yang terjadi karena pertambahan lowongan pekerjaan lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini dalam jangka panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu. Pengangguran terbuka dapat pula dikarenakan kegiatan ekonomi yang menurun, kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga manusia, atau akibat kemunduran perkembangan suatu industri.

2. **Pengangguran Tersembunyi**

adalah pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan, padahal dengan mengurangi tenaga kerja sampai jumlah tertentu tidak akan mengurangi jumlah produksi. Pengangguran ini terutama terjadi di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang

digunakan tergantung kepada banyak faktor. Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak negara berkembang seringkali didapati jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan agar dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Misalnya pengangguran tersembunyi adalah orang yang melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginannya dan kemampuannya.

3. Pengangguran Musiman

adalah pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu di dalam satu tahun. Bentuk pengangguran terutama terjadi di sektor pertanian dan perikanan. Biasanya pengangguran seperti itu berlaku pada waktu-waktu di mana kegiatan bercocok tanam sedang menurun kesibukannya. Waktu di antara menuai dan masa menanam berikutnya dan periode di antara sesudah menanam bibit dan masa menuai hasilnya adalah masa yang kurang sibuk dalam kegiatan pertanian. Pada periode tersebut banyak di antara para petani dan tenaga kerja di sektor pertanian tidak melakukan suatu pekerjaan. Berarti mereka sedang dalam keadaan menganggur. Jenis pengangguran ini hanya sementara saja, dan berlaku dalam waktu-waktu tertentu.

4. Pengangguran Setengah Menganggur

Kelebihan penduduk di sektor pertanian di negara-negara berkembang disertai pertambahan penduduknya yang cepat telah menimbulkan percepatan dalam proses urbanisasi. Salah satu tujuan dari urbanisasi tersebut adalah untuk mencari pekerjaan di kota-kota. Tidak semua orang yang hijrah ke kota-kota dapat memperoleh pekerjaan. Banyak di antara mereka yang terpaksa menganggur sepenuh waktu.

Disamping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka lebih rendah dari jam kerja normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari.

Masalah Pengangguran dan Krisis Sosial

Berdasarkan teori Fungsional Struktural, masalah sosial timbul karena terjadinya ketidak seimbangan lembaga-lembaga sosial sehingga menyebabkan fungsi lembaga-lembaga tersebut terganggu. Pengangguran dalam hal ini, terjadi akibat kepincangan lembaga ekonomi dan menimbulkan masalah bagi lembaga sosial. Pengangguran menjadi masalah sosial tidak karena bersumber pada penyimpangan norma-norma masyarakat, tetapi karena ia rawan menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya, seperti kemiskinan, meningkatnya kriminalitas, premanisme, prostitusi, dan lain-lain. Besarnya jumlah pengangguran di Indonesia lambat-laun akan menimbulkan banyak masalah sosial yang nantinya akan menjadi suatu krisis sosial. Suka atau tidak suka, pengangguran selalu berkorelasi dengan kemiskinan yang identik dengan kebodohan, kejahatan dan perilaku menyimpang lainnya. Indikator masalah sosial ini bisa dilihat dari begitu banyaknya anak-anak yang orang tuanya menganggur, yang mulai turun ke jalan. Mereka menjadi pengamen, pedagang asongan maupun pelaku tindak kriminalitas. Mereka adalah generasi yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan maupun pembinaan yang baik. Ironisnya, apa yang terjadi saat ini adalah banyak para penganggur yang mencari jalan keluar dengan mencari nafkah yang tidak halal. Banyak dari mereka yang menjadi pencopet, penjaja seks, pencuri, preman, penjual narkoba, dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit mereka yang dibayar untuk berbuat rusuh atau anarkis demi kepentingan politik salah satu kelompok tertentu. Belum lagi dengan semakin menjamurnya prostitusi di Indonesia, sebuah pilihan hidup akibat himpitan ekonomi.

Gambaran Pengangguran di kota Banjarmasin

Berdasarkan data BPS /Sakernas tahun 2013 s/d 2016 tingkat pengangguran terbuka di Banjarmasin dapat digambarkan sebagai berikut tabel 1:

Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka di Banjarmasin

| Tahun | Angkatan Kerja | Bekerja | Pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka - TPT |
|-----------|----------------|-----------|--------------|------------------------------------|
| | | | | (%) |
| 2010 | 2,197,325 | 2,095,705 | 101,620 | 4,62 |
| 2011 | 2,233,195 | 2,146,572 | 86,623 | 3,88 |
| 2012 | 2,182,524 | 2,106,514 | 76,010 | 3,48 |
| 2013 | 2,140,166 | 2,053,823 | 86,343 | 4,03 |
| Rata-Rata | | | | 4,01 |

Sumber : BPS Banjarmasin
 (Data Sakernas 2013-2016)

Pada Tabel 1 menggambarkan tingkat pengangguran di Banjarmasin selama 2013 s/d 2016, dengan tingkat pengangguran rata-rata 4,01, terlihat cenderung turun, pada tahun 2013 tingkat pengangguran sebesar 4,62% atau sebanyak 101.620 orang, lalu pada tahun 2014 tingkat pengangguran turun cukup signifikan menjadi 3,88% atau dengan jumlah pengangguran sebanyak 86.623 orang, selanjutnya pada tahun 2015 tingkat pengangguran turun lagi menjadi sebesar 3,48% dengan jumlah pengangguran sebanyak 76.010 orang sedangkan pada tahun 2016 tingkat pengangguran naik menjadi 4,03 dengan jumlah pengangguran sebesar 86.343 orang. Mengenai data tingkat pengangguran pada tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 s/d 2016 dapat digambarkan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. tingkat pengangguran pada tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 s/d 2016

| No | Kabupaten/Kota | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Rata-rata |
|------------------|----------------|------|------|------|------|-----------|
| 1 | SAMBAS | 4.53 | 2.99 | 3.11 | 3.03 | 3.42 |
| 2 | BENGKAYANG | 3.21 | 3.32 | 3.30 | 2.30 | 3.03 |
| 3 | LANDAK | 4.61 | 3.18 | 4.80 | 3.24 | 3.96 |
| 4 | MEMPAWAH | 7.80 | 3.35 | 4.67 | 5.66 | 5.37 |
| 5 | SANGGAU | 3.62 | 3.27 | 1.39 | 0.78 | 2.26 |
| 6 | KETAPANG | 3.90 | 3.70 | 1.95 | 4.70 | 3.56 |
| 7 | SINTANG | 2.35 | 3.38 | 2.05 | 2.24 | 2.51 |
| 8 | KAPUAS HULU | 2.25 | 2.50 | 1.58 | 2.09 | 2.10 |
| 9 | SEKADAU | 2.31 | 2.93 | 0.60 | 1.44 | 1.82 |
| 10 | MELAWI | 1.30 | 3.08 | 2.90 | 3.99 | 2.82 |
| 11 | KAYONG UTARA | 4.29 | 2.56 | 6.96 | 4.66 | 4.62 |
| 12 | KUBU RAYA | 6.20 | 4.52 | 6.06 | 9.26 | 6.51 |
| 13 | PONTIANAK | 7.79 | 7.26 | 5.35 | 6.12 | 6.63 |
| 14 | SINGKAWANG | 8.05 | 5.34 | 5.75 | 4.59 | 5.93 |
| Kalimantan Barat | | 4.62 | 3.88 | 3.48 | 4.03 | 4.01 |

Diolah dari sumber : BPS Banjarmasin
 (Data Sakernas 2013-2016)

Tabel 3. tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan

| No. | Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan | Tingkat Pengangguran (%) | | | | Rata-rata (%) |
|--------|--------------------------------------|--------------------------|------|------|------|---------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 1 | Tidak/Belum pernah sekolah | 1.88 | 2.23 | 0.77 | 1.27 | 1. |
| 2 | Tidak/Belum Tamat SD | 2.20 | 1.54 | 1.63 | 2.10 | 1. |
| 3 | Sekolah Dasar | 2.96 | 2.06 | 2.77 | 2.55 | 2. |
| 4 | SLTP Umum | 5.19 | 5.50 | 4.65 | 3.93 | 4. |
| 5 | SLTP Kejuruan | 2.66 | 4.14 | 1.37 | 0.00 | 2. |
| 6 | SMA | 9.22 | 9.19 | 7.07 | 9.14 | 8. |
| 7 | SMK | 10.99 | 5.40 | 6.88 | 8.53 | 7. |
| 8 | Diploma I/II | 1.57 | 1.99 | 2.60 | 1.27 | 1. |
| 9 | Diploma III / Akademi | 9.54 | 4.12 | 3.94 | 4.90 | 5. |
| 10 | Diploma IV / Universitas | 14.67 | 8.36 | 2.86 | 5.21 | 7. |
| Jumlah | | 4.62 | 3.88 | 3.48 | 4.03 | 4. |

Tabel 3 diatas menggambarkan tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, berdasarkan data tersebut tingkat pengangguran dengan rata-rata tertinggi terjadi pada tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan persentase rata-rata 8,65% dan 7,95% disusul dari tamatan Universitas/Diploma IV sebesar 7,77% dan tamatan Diploma III/Akademi sebesar 5,63%. Hal menggambarkan bahwa tingkat pengangguran rata-rata tertinggi berasal dari pengangguran terdidik dimana tamatan pendidikan tertinggi minimal adalah Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan hingga perguruan tinggi. Tingginya tingkat pengangguran terdidik mengindikasikan

setiap tahun SMA/SMK dan Universitas meluluskan para siswa dan sarjana yang jumlahnya ribuan namun tidak semua lulusan sekolah dan perguruan tinggi dapat tertampung di dunia kerja, permasalahan pengangguran terdidik jika dibandingkan dengan pengangguran non terdidik, justru lebih kompleks pengangguran terdidik sebab pengangguran non terdidik bersedia untuk bekerja disektor non formal, sedangkan pengangguran terdidik apalagi yang berasal dari universitas dengan bekal ilmu yang dimiliki menginginkan bekerja disektor formal agar mendapat gaji tinggi dan prestise di tengah masyarakat. Penyebab utama pengangguran terdidik adalah kurang selarasnya perencanaan pembangunan pendidikan dan berkembangnya lapangan kerja yang tidak sesuai dengan jurusan mereka, sehingga para lulusan yang berasal dari jenjang pendidikan atas baik umum maupun kejuruan dan tinggi tersebut tidak dapat terserap ke dalam lapangan pekerjaan yang ada. Faktanya lembaga pendidikan di Indonesia hanya menghasilkan pencari kerja, bukan pencipta kerja. Padahal, untuk menjadi seorang lulusan yang siap kerja, mereka perlu tambahan keterampilan di luar bidang akademik yang mereka kuasai. Selain itu terdapat penyebab lain yang membuat tingginya pengangguran terdidik yaitu:

1. Para pengangguran terdidik lebih memilih pekerjaan yang formal dan mereka maunya bekerja di tempat yang langsung menempatkan mereka di posisi yang enak, dapat banyak fasilitas, dan maunya langsung dapat gaji besar. Sektor pertanian, kelautan, perkebunan, dan perikanan adalah contoh bidang-bidang yang masih membutuhkan tenaga ahli. Namun para sarjana tak mau bekerja di tempat-tempat seperti itu dan mereka umumnya juga tidak mau memulai karier dari bawah.
2. Ketidakcocokkan antara karakteristik lulusan baru yang memasuki dunia kerja (sisi penawaran tenaga kerja) dan kesempatan kerja yang tersedia (sisi permintaan tenaga kerja). Ketidakcocokkan ini mungkin bersifat geografis, jenis pekerjaan, orientasi status, atau masalah keahlian khusus.
3. Semakin terdidik seseorang, semakin besar harapannya pada jenis pekerjaan yang aman. Golongan ini menilai tinggi pekerjaan yang stabil daripada pekerjaan yang beresiko tinggi sehingga lebih suka bekerja pada perusahaan yang lebih besar daripada membuka usaha sendiri. Meningkatnya pengangguran terdidik di Indonesia, antara lain disebabkan adanya keinginan memilih pekerjaan yang aman dari resiko. Dengan demikian angkatan kerja terdidik lebih suka memilih menganggur daripada mendapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka.
4. Terbatasnya daya serap tenaga kerja di sektor formal (tenaga kerja terdidik yang jumlahnya cukup besar memberi tekanan yang kuat terhadap kesempatan kerja di sektor formal yang jumlahnya relatif kecil).
5. Belum efisiennya fungsi pasar kerja. Di samping faktor kesulitan memperoleh lapangan kerja, arus informasi tenaga kerja yang tidak sempurna dan tidak lancar menyebabkan banyak angkatan kerja bekerja di luar bidangnya. Kemudian faktor gengsi juga menyebabkan lulusan akademi atau universitas memilih menganggur karena tidak sesuai dengan bidangnya.
6. Rendahnya kualitas lulusan baik dari tingkat akademi ataupun universitas. Lulusan yang memiliki kualitas tidak terlalu bagus menyebabkan ketika seorang lulusan tidak mampu mendapatkan pekerjaan sesuai harapan dan tingkat pendidikan maupun jurusan keilmuan yang diambalnya maka ia tidak mampu mendirikan atau menciptakan sebuah usaha yang mampu menyerap dirinya maupun orang lain ke dalam lapangan pekerjaan.
7. Budaya malas juga sebagai salah satu faktor penyebab tingginya angka pengangguran sarjana di Indonesia.
8. Meningkatnya angka pengangguran terdidik di perkotaan juga disebabkan karena ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan kesempatan kerja. Adanya kesenjangan antara angkatan kerja dan

lapangan kerja tersebut berdampak terhadap perpindahan tenaga kerja (migrasi) baik secara spasial antara desa-kota maupun secara sektoral. Selain itu, lulusan sarjana dari daerah pedesaan juga banyak yang berurbanisasi ke kota besar untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan ijazahnya namun faktanya tidak semua lulusan sarjana tersebut mendapat pekerjaan sesuai yang ia inginkan dan akhirnya hanya menambah jumlah pengangguran terdidik di perkotaan.

9. Banyak pemuda “menggantungkan” nasibnya pada CPNS, padahal menjadi PNS bukanlah udara segar menjamin kemakmuran hidup. Karena kenyataannya, banyak PNS miskin dan belum mampu memenuhi kehidupan layak bagi keluarga mereka. Untuk menangani masalah pengangguran terdidik perlu solusi jangka panjang mengingat jumlah pengangguran terdidik semkain meningkat tiap tahunnya. Salah satu cara untuk

menangani masalah pengangguran terdidik ini adalah dengan menumbuhkan jiwa kewirausahaan melalui pendidikan formal, maupun melalui pelatihan-pelatihan informal, sehingga dengan tumbuhnya jiwa kewirausahaan dapat mengubah mindset dari mencari pekerjaan menjadi membuat pekerjaan sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki. Para pengangguran terdidik dapat menjalankan kewirausahaan yang salah satunya adalah Industri kreatif, karena potensi pengembangan industri kreatif di Banjarmasin sangat besar karena daerah kita memiliki berbagai macam budaya dan kekayaan tradisi dengan keunikan-keunikannya serta sumber daya alam melimpah dan sumber daya manusia yang terdidik.

Arah Kebijakan & Strategi dengan sasaran membentuk masyarakat dengan pola pikir dan moodset kreatif yang didukung oleh talenta dan pekerja kreatif

Table 4. arah kebijakan dan strategi pengembangan

| No | Arah Kebijakan | Strategi |
|----|---|---|
| 1. | Peningkatan jumlah SDM kreatif yang berkualitas secara berkesinambungan (sustainable) dan tersebar merata (widespread) di wilayah nusantara | a) Meningkatkan anggaran pendidikan nasional sesuai amanat undang-undang & mengupayakan proporsi yang signifikan bagi peningkatan kreativitas b) Melakukan kajian tentang kurikulum berorientasi kreativitas & pembentukan entrepreneurship terhadap tumbuhnya kreativitas anak didik dan melakukan revisi sesuai kebutuhan c) Melakukan kajian tentang kurikulum berorientasi kreativitas & pembentukan entrepreneurship terhadap tumbuhnya kreativitas anak didik dan melakukan revisi sesuai kebutuhan d) Meningkatkan kualitas pendidikan nasional lewat kurikulum yang berorientasi kreativitas & pembentukan entrepreneurship e) Membangun akses pertukaran informasi & pengetahuan (knowledge sharing) di masyarakat lewat ruang public baik secara fisik maupun maya, dalam skala nasional maupun internasional |
| 2. | Peningkatan jumlah dan perbaikan kualitas lembaga pelatihan dan talenta kreatif | a) Membangun lembaga tinggi seni budaya dan ilmu pengetahuan & teknologi di propinsi-propinsi yang talenta kreatifnya tinggi tapi belum terwadahi b) Memperbaiki infrastruktur dan kualitas pengajaran di lembaga pendidikan yang telah ada namun mengalami kendala keuangan, infrastruktur dan tenaga pengajar |

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>c) Membangun mekanisme public-private, partnership antara pemerintah dan industry kreatif yang atraktif untuk mengembangkan pendidikan berkualitas dengan sumber dana masyarakat/swasta</p> <p>d) Mendorong (memberikan insentif & kemudahan) pihak swasta untuk membangun lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas, berbiaya terjangkau dan bernilai guna</p> <p>e) Menciptakan link and match antara lulusan pendidikan tinggi dengan sector industry kreatif yang membutuhkan</p> <p>f) Menjamin system standarisasi mutu pendidikan tinggi dengan evaluasi yang berkala, efektif dan obyektif</p> |
| 3. | <p>Penekanan komitmen dan Political will Pemerintah untuk meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap insan kreatif sebagai profesi yang membawa nilai tambah secara ekonomi & sosial</p> | <p>a) Memberi dukungan bagi insan kreatif berbakat yang mendapat kesempatan di dunia internasional</p> <p>b) Memberikan dukungan pada kegiatan dan organisasi seni budaya dan iptek yang berperan dalam industry kreatif</p> <p>c) Menyelenggarakan acara dan program yang menggali mengangkat dan mempromosikan talenta kreatif yang ada di masyarakat</p> <p>d) Mengupayakan mekanisme remunerasi, yang proporsional yang membuat angkatan kerja tertarik pada profesi dalam industry kreatif</p> <p>e) Membangun mekanisme kemitraan antara insan kreatif terkemuka dan yang potensial untuk dikembangkan lewat proses mentoring</p> |
| 4. | <p>Peningkatan jumlah entrepreneur kreatif secara signifikan sehingga mendorong tumbuhnya lapangan kerja kreatif</p> | <p>a) Mendukung para entrepreneur kreatif yang membutuhkan kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha, baik dari aspek permodalan, perijinan maupun pemasaran</p> <p>b) Mendorong para wirausahawan sukses untuk berbagi pengalaman, keahlian dan dukungannya pada potensi wirausahawan yang ada di pendidikan tinggi lewat studi umgenerale, seminar, mentoring dan pelatihan</p> <p>c) Membangun mekanisme kemitraan antara pelaku bisnis sebagai wadah business coaching</p> |
| 5. | <p>Pengakuan dunia internasional terhadap kualitas insan kreatif Indonesia yang kiprahnya secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh bangsa Indonesia</p> | <p>a) Membangun basis data talenta kreatif Indonesia di berbagai belahan dunia dan mempromosikan secara aktif prestasi dan cerita sukses insan kreatif Indonesia di dalam dan luar negeri</p> <p>b) Memfasilitasi jejaring antar para talenta kreatif Indonesia di mancanegara untuk terjadinya knowledge sharing</p> <p>c) Mendorong terjadinya kerjasama, sharing pengetahuan dan karya bersama antar para talenta kreatif Indonesia di mancanegara dengan di dalam negeri</p> <p>d) Memfasilitasi talenta kreatif dari mancanegara untuk datang ke Indonesia dengan tujuan sebagai sumber belajar dan bertukar informasi lewat mekanisme penghargaan yang proporsional</p> |

SIMPULAN

Pengangguran terdidik di Banjarmasin terbilang tinggi berdasarkan data BPS dari 2013 s/d 2016 rata-rata tingkat pengangguran

pada tamatan SMA/SMK – Sarjana/ universitas berkisar kurang lebih 7-8% hal ini disebabkan kurang selarasnya perencanaan pembangunan pendidikan dan berkembangnya lapangan kerja yang tidak

sesuai dengan jurusan mereka, sehingga para lulusan yang berasal dari jenjang pendidikan atas baik umum maupun kejuruan dan tinggi tersebut tidak dapat terserap ke dalam lapangan pekerjaan yang ada. Faktanya lembaga pendidikan di Indonesia hanya menghasilkan pencari kerja, bukan pencipta kerja. Oleh karena itu pemerintah sekarang sedang berusaha mengembangkan Industri Kreatif sebagai solusi mengatasi pengangguran, Pengembangan industri kreatif sangat potensial di Banjarmasin karena daerah ini memiliki berbagai macam budaya dan tradisi yang merupakan ciri daerah yang apabila di kemas dengan baik akan memiliki daya jual/komersial yang tinggi, untuk itu di butuhkan peran pemerintah untuk menumbuhkan talenta –talenta kreatif di Banjarmasin dimana talenta-talenta tersebut merupakan modal utama dalam mengembangkan Industri Kreatif yang dapat mengangkat potensi- potensi daerah yang ada di Banjarmasin melalui pelatihan-pelatihan serta kurikulum pendidikan yang menumbuhkan jiwa kewirausahaan serta kreatifitas. memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan di pendahuluan. Saran utama yang disampaikan ditujukan secara khusus kepada Biro Pusat Statistik, Sebagai badan yang sudah mapan dalam perhitungan kontribusi-kontribusi ekonomi, maka Biro Pusat Statistik sebaiknya melakukan perhitungan kontribusi ekonomi industri kreatif secara rutin, baik tahunan maupun triwulanan agar tersedia data atas perkembangan Industri Kreatif di seluruh Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Azwar, S. 2003. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danim, Sudarwan. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025.
- Eddy Jusuf, 2010, Industri Kreatif Solusi Pengangguran dan Kemiskinan
- Elwin, Tobing. 2004. Pengangguran Tenaga Kerja Terdidik. Media Indonesia.
- Nanga, M., (2001): Makroekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumarsono, S., (2003): Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Tjiptoherijanto, Prijono dan Sufastie Soemitro. Pemberdayaan Penduduk dan Penigkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Jakarta, 1998.
- Tobing, Elwin. Pengangguran Tenaga Kerja Terdidik. Jakarta, 1994.
- Undang-Undang (1990): Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Diperbanyak oleh PT Armas Duta Jaya Jakarta.
- Wurdiyanti Yuli Astuti, 2014, Pengangguran Terdidik di Perkotaan